

# Pemetaan Sosiologis Perilaku Memilih di Nusa Tenggara Barat

Agus Chandra\*

## *Abstrak*

Terdapat dua mazhab yang mendominasi studi tentang perilaku memilih (votting behavior) di era kekinian, yakni; mazhab sosiologis dan psikologis. Yang pertama meyakini perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan yang kedua meyakini perilaku memilih dikonstruksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh ikatan emosional terhadap partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan analisis terhadap kandidat. Mengkontradiksikan dua pikiran ini tentu hanya akan mempersempit obyek kajian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Untuk menghindari keterjebakan atas dua perdebatan mazhab tersebut, penulis memilih mempertemukan keduanya dalam kajian perilaku memilih (votting behavior). Pertemuan kedua mazhab tersebut menghasilkan pemetaan perilaku memilih masyarakat NTB berada pada tiga kategori. Kategori pertama, pemilih yang memilih karena figuritas dan tokoh panutan. Kategori ini disebut sebagai pemilih tradisional. Kedua, pemilih yang memilih karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, seperti percaya pada kapasitas kandidat. Kategori ini disebut sebagai pemilih rasional. Ketiga, pemilih yang memilih bahkan tidak memilih karena terhambat faktor teknis pemilu dan aktivitas ekonomi. Ini disebut sebagai pemilih pragmatis.

**Keyword:** *Pemetaan, Sosiologis, Perilaku Memilih*

## *Abstract*

*There are two schools of thought that dominate the study of voting behavior in the contemporary era, namely; sociological and psychological schools of thought. The former believes that voting behavior of someone is influenced by environmental factors. While the latter believes that voting behavior is constructed jointly or individually by the emotional ties to a political party or the candidate, orientation to the issues, and analysis of the candidates. Contradicting two thoughts will only restrict the object of study of sociology as a science that studies the public. To avoid being stuck on the debate of two thoughts, the author chooses to combine both thoughts in the study of voting behavior. The combination of these thoughts produces mapping of voting behavior in NTB people in three categories. The first, voters give voice because of figures and role models. This category is mentioned as traditional voters. Second, voters give voice for considerations of rationality, such as trust towards the capacity of the candidate. This category is called as rational voters. Third, voters give voice but fail because of technical factors hampering the election and economic activity. This is known as pragmatic voters.*

**Keyword;** *Mapping, Sociological, Voting Behavior*

---

### **Korespondensi:**

Fakultas Dakwah & Komunikasi, IAIN Mataram  
Jl. Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125  
aguschandra.lombok@gmail.com

## **Pendahuluan**

Penelitian perilaku memilih (*voting behavior*) didominasi oleh dua aras pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. **Pendekatan sosiologis** dipelopori oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Columbia (*Colombia University Bureau of Applied Science*). Karena sebab inilah, pendekatan sosiologis dalam studi voting disebut juga sebagai *mazhab Colombia* atau *Kelompok Colombia*. Dalam karya-karya yang diterbitkan kelompok ini diungkapkan, perilaku politik seseorang terhadap partai politik tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

**Pendekatan Psikologis** dipelopori oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Research Centre*). Karena itulah studi voting yang menggunakan pendekatan psikologis dikenal juga sebagai *Mazhab Michigan* atau *Kelompok Michigan*. Pendekatan ini berpandangan perilaku memilih dikonstruksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh ikatan emosional terhadap partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan orientasi terhadap kandidat.

Guna mengungkap peta perilaku pemilih di NTB, penulis menggunakan mazhab sosiologis sekaligus mazhab psikologis. Alasan pilihan mazhab ini adalah perilaku memilih merupakan sub-bagian dari perilaku sosial. Mengikuti pandangan Max Weber, sosiologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari perilaku sosial secara sistematis. Namun untuk mengungkap objek kajiannya, sosiologi membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain. Dalam kajian tentang perilaku pemilih, disiplin ilmu yang paling dekat dengan sosiologi adalah psikologi sosial.

## **Pemikiran Sosiologi Politik Tentang Perilaku Memilih**

Pendalaman tentang bagaimana pandangan sosiologi politik tentang perilaku dan partisipasi politik memerlukan penelusuran dari membahas tema tentang kajian ilmu politik, dilanjutkan dengan kajian sosiologi terhadap gejala politik. Pola ini diperlukan mengingat ilmu politik dan sosiologi merupakan disiplin ilmu yang berbeda, namun dalam melakukan kajian keduanya saling membutuhkan. Terdapat berbagai gejala sosiologis yang mempengaruhi gejala politik, demikian juga sebaliknya. Dalam beberapa kasus keduanya perlu disandingkan untuk saling melengkapi.

Terdapat banyak batasan tentang politik yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Robert Dahl. Ia mendefinisikan politik sebagai “*who gets what, when and how*”, artinya siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana (Dahl, dalam Setiadi dan Kolip, 2013:16). Dalam kajian politik, kata “siapa” bisa merujuk pada sekelompok orang yang memberikan suara atau kontestan dalam pemilu. Contoh bentuk konsep ini, para fungsionaris memberikan visi dan misi politik partainya, atau para elit politik membicarakan suatu kebijakan politik yang berpengaruh pada masyarakat umum, atau bisa saja sekelompok masyarakat memperbincangkan visi, misi dan program calon kepala daerah. Kesemua contoh ini

merupakan sebagian kecil dari aktivitas politik, tentu saja menjadi wilayah kajian ilmu politik. Lantas persoalannya seperti apa ilmu politik itu? Miriam Budiardjo mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan.

Dalam suatu pemilu terdapat peserta pemilu menawarkan visi, misi dan program mereka kepada masyarakat, kemudian masyarakat memberikan suaranya. Pasca pemilu para peserta pemilu terpilih merealisasikan komitmen terhadap programnya dan masyarakat mendapatkan manfaat sosial, ekonomi dan politik atas realisasi program para politisi terpilih. Jangka waktu antara implementasi program oleh para pemimpin politik terpilih berdasarkan masa jabatannya, dan cara yang dilakukan mereka untuk memenuhi komitmennya kepada masyarakat melalui distribusi kebijakan pembangunan, dengan pemilu selanjutnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk dapat memberi evaluasi atas kepemimpinan politik. Dalam jangka waktu itu berarti masyarakat secara aktif menggunakan nalar rasionalitas individual sampai nalar sosial mereka untuk menjadi bahan pada pemilu selanjutnya. Perilaku individu dalam membuat evaluasi terhadap peran kandidat dan partai politik, serta keputusan mereka memilih, merupakan fenomena sosial. Kesemuanya ini merupakan eksemplar-eksemplar perilaku sosial dalam kehidupan politik suatu masyarakat yang dapat menjadi lokus kajian sosiologi politik.

Salah satu kajian sosiologi di bidang politik adalah interaksi politik. Terdapat beberapa hal yang diperoleh para aktor yang melakukan interaksi politik, adalah; (a) para fungsionaris partai politik atau kandidat politik berharap dari kegiatan politiknya membuahkan hasil yaitu kekuasaan, (b) para pendukung partai atau pendukung kandidat politik mengharapkan keterpihakan suatu kebijakan hasil proses politik kepada dirinya, (c) para aktor yang merasa dirugikan dari kebijakan politik melakukan aksi tuntutan kepada aktor yang pada saat itu memegang kekuasaan. Dengan demikian, proses politik adalah proses interaksi antara individu versus individu, individu versus kelompok atau kelompok versus kelompok, yang menghasilkan produk politik. Sedangkan yang dimaksud produk politik adalah kebijakan publik yang telah dihasilkan melalui mekanisme politik yang dipahami bersama.

Sebagai ilmu mandiri, sosiologi memusatkan perhatiannya pada gejala sosial yang didalamnya terdapat proses-proses sosial. Proses sosial dipahami sebagai hubungan antara individu-individu, Bisa berfokus pada individu versus kelompok, atau kelompok versus kelompok yang menghasilkan produk dari proses sosial itu sendiri. Sosiologi menempatkan masyarakat sebagai tempat berinteraksi yang berupa tindakan- tindakan individu atau kelompok di mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi sistem sosial di dalam struktur masyarakat itu sendiri.

Aktivitas politik merupakan salah satu bagian dari interaksi sosial yang di dalamnya terdapat beberapa fenomena. Diantara fenomena itu adalah; (1) aktivitas yang berupa hubungan antara pemerintah dengan rakyat di dalam suatu struktur politik yang

dalam hal ini bisa negara dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan publik, (2) aktivitas warga negara yang saling memperebutkan kekuasaan dan kewenangan di dalam suatu struktur politik untuk dapat menempati posisi sebagai pemegang kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, aktivitas politik adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan bagaimana distribusi kekuasaan dan kewenangan di dalam suatu negara, juga berupa aktivitas aksi dan reaksi yang berhubungan dengan kebijakan publik sebagai produk dari proses politik di dalam struktur politik. Sedangkan anggota masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut dinamakan aktor politik. Aktor politik dibedakan menjadi dua, yakni;

- a. Tipe pemimpin atau pejabat (elit politik). Aktor ini memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang membuat dan melaksanakan kebijakan publik atau yang disebut keputusan politik.
- b. Tipe warga negara (rakyat) yaitu kelompok yang tidak memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan publik, tetapi memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*) terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

Merujuk pada deskripsi politik, dan sosiologi di atas, sosiologi politik memfokuskan kajiannya pada deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang gejala sosial politik, terutama menyangkut bagaimana proses terbentuknya kekuasaan dan pola-pola distribusinya dalam masyarakat. Disamping itu, sosiologi politik juga memfokuskan perhatiannya pada sikap dan perilaku politik masyarakat, terutama menyangkut persoalan tentang bagaimana masyarakat merespon kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa, dan bagaimana masyarakat bersikap dalam pemilihan umum.

Suryadi (2007:7) mengungkapkan sosiologi politik merupakan disiplin yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik.<sup>3</sup> Dengan demikian posisi sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Sederhananya sosiologi politik merupakan wilayah pertemuan antara sosiologi dan ilmu politik, sebagaimana tampak pada gambar 1 berikut ini.

**Gambar 1. Wilayah Sosiologi Politik**



Salah satu bentuk hubungan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik sebagai area sosiologi politik adalah perilaku masyarakat ketika menggunakan hak pilih dalam pemilu atau sering disebut perilaku memilih. Untuk mengkaji fenomena perilaku memilih tulisan ini menggunakan dua mazhab, sebagai berikut;

### **1. Mazhab Sosiologis**

Seperti lazim diketahui, pendekatan perilaku yang menumpukan perhatian pada karakteristik latar belakang sosiologis seseorang mendapat perhatian dalam penelitian ilmu politik. Banyak ilmuan politik menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya individu berperilaku ketika dihadapkan pada pilihan politik dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa keadaan individu untuk memilih, apalagi dalam konteks Pemilu menjadi stimulus yang mendorong individu tersebut untuk berperilaku, yaitu memilih alternatif yang ditawarkan.

Karya Asrinaldi berhasil mengungkap beberapa penelitian terkait perilaku pemilih dalam pandangan sosiologis. Salah satu hasil penelitian yang dibebaskan adalah karya Lazarsfeld, Bareslon & Gaudit yang bertajuk *The People`s Choice : how the voter makes up his mind in a presidential campaign* (1944). Asrinaldi menyimpulkan hal penting dalam karya ini adalah perilaku memilih seseorang merefleksikan keanggotaan kelompok sosial yang dibentuk oleh kekuatan sosioekonomi dan demografi. Asumsi ini berangkat dari eksistensi individu sebagai makhluk sosial yang berada dalam lingkungan sosial yang dinamis. Lingkungan inilah yang sebenarnya mempengaruhi nilai dan keyakinan politik individu, selanjutnya menjadi bagian penting dalam perkembangan sikap, perilaku dan tindakan politik mereka.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Lazarsfeld, Bareslon & McPhee (1954) yang berjudul *Voting a study of opinion formation in a presidential campaign*, menemukan adanya kesamaan persepsi politik individu yang dibentuk karena interaksi antara individu yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, teman dan sejawat dalam pekerjaan. Latar belakang sosial yang demikian merupakan aspek penting dari lingkungan sosial individu ketika mereka bersosialisasi. Inilah yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan preferensi politik individu untuk merespon gejala poltiik yang dihadapinya.

Para pengikut mashab sosiologi menyebutkan bahwa faktor sosiologis individu adalah faktor yang menentukan pilihan akhir yang digabungkan kedalam indeks predisposisi politik mereka. Para sarjana yang tergabung dalam mazhab ini meyakini bahwa pendekatan sosiologi ini pada mulanya berasal dari Eropa yang dimulai pada tahun 1940 ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat dilakukan. Oleh sebab itu pendekatan sosiologis ini di sebut sebagai model sosiologi politik Eropa. Istilah lain yang sering digunakan terhadap pendekatan ini adalah *social determination approach* karena terkait dengan karakteristik sosiologis seseorang seperti orang tua, status sosial, agama, kelas, dan tempat tinggal.

Penelitian yang pernah dilakukan Gerald Pomper, misalnya berusaha merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi perilaku memilih kedalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih (*voter*). Kajian tersebut menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara predisposisi sosial ekonomi keluarga tersebut dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga seperti preferensi politik ayah atau ibu berpengaruh pada preferensi politik anak dalam keluarga tersebut. Variabel-variabel sosiologis lainnya yang membentuk preferensi politik individu adalah agama. Di Indonesia misalnya penelitian yang dilakukan oleh Afan Gafar menemukan Negara, agama, dan asal-usul budaya tertentu berpengaruh pada bentuk dukungan individu pada partai politik tertentu. Preferensi politik masyarakat Jawa dalam kajian Gafar dikelompokkan kedalam tiga kategori latar belakang yakni abangan, priyai, dan santri.

Pengelompokan masyarakat politik yang digambarkan Gafar di atas telah dijelaskan oleh studi Geertz terhadap sebuah kota kecil di Jawa Timur sekitar tahun 1950-an. Geertz menemukan tiga pengelompokan atau varian agama jawa yang ikut berpengaruh terhadap karakteristik sosial mereka, yakni; abangan, santri, dan priyayi. Berikut dijelaskan karakteristik dari ketiga varian tersebut.

Varian abangan, dicirikan oleh menguatnya tradisi upacara-upacara slametan atau kenduren dan kepercayaan terhadap makhluk halus. Pada masyarakat abangan upacara slametan menjadi wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial serta pengalaman individual sehingga memperkecil ketegangan dan konflik di antara individu-individu dalam komunitas mereka. Upacara slametan dilakukan untuk merespons semua kejadian yang ingin dipergantikan atau ditebus. Misalnya, slametan perkawinan, kelahiran, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, membuka pabrik, mimpi buruk, memohon kepada arwah penjaga desa, khitanan, dan permulaan suatu rapat politik (Geertz, 2014:3).

Untuk menjelaskan karakteristik santri Geertz membedakannya dengan varian abangan. Ada dua perbedaan yang mencolok menurut hasil penelitian Geertz. *Pertama*, kalangan abangan benar-benar tidak acuh terhadap doktrin tetapi terpesona oleh detail upacara. Sementara kalangan santri, perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan aspek ritual islam yang sudah menipis. *Kedua*, terletak pada organisasi sosial mereka. Untuk kalangan abangan, unit sosial paling dasar tempat hampir semua upacara berlangsung adalah rumah tangga. Sedangkan kalangan santri, rasa sebagai satu komunitas (umat) adalah yang terutama. Kalangan santri melihat islam sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris.

Apabila abangan diidentifikasi sebagai petani Jawa yang tidak melek huruf, maka kata Geertz varian priyayi adalah golongan ningrat. Priyayi umumnya selalu berada di kota-kota yang jumlahnya terus bertambah seiring modernisasi. Namun pada dasarnya, priyayi merupakan islam dari kalangan bangsawan atau ningrat, birokrat dan pengusaha. Pandangan mereka tentang islam lebih modern bahkan cenderung liberal.

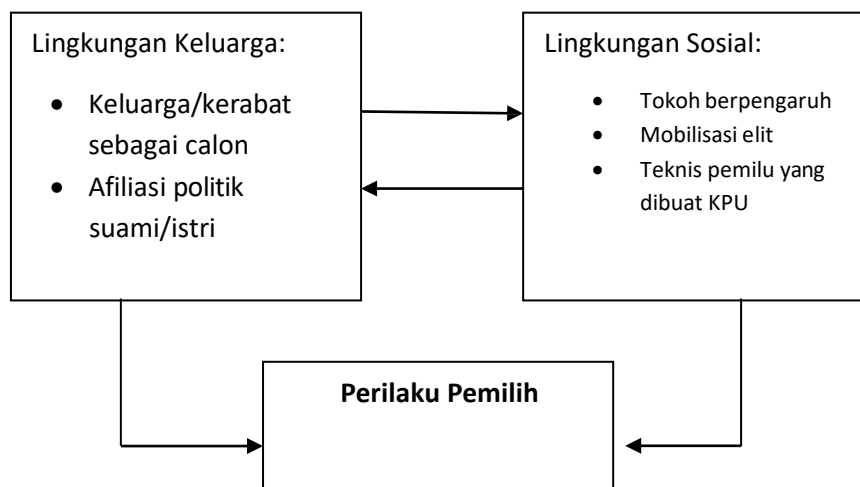
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mashab sosiologis melihat perilaku pemilih dikonstruksi oleh proses prolitik yang diterima individu yang dimulai

dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sosial. Proses sosialisasi tersebut ditandai dengan terbentuknya latar belakang sosiologis dan karakteristik afiliasi politik orang tua, agama, dan latar belakang sosial budaya lainnya, seperti kelas, jenis kelamin, dan usia.

Penegasan terhadap cara berpikir di atas juga dapat ditemukan dalam karyanya Andrew Heywood. Ia mengatakan model sosiologis dalam kajian perilaku pemilih berusaha mengaitkan perilaku pemilih dengan keanggotaan kelompok. Bahwa para pemilih cenderung mengadopsi sebuah pola voting yang merefleksikan posisi ekonomi dan sosial dari kelompok di mana mereka menjadi bagiannya. Beberapa kelompok yang dapat diidentifikasi mempengaruhi voting adalah; pembagian kelas, gender, etnisitas, agama dan wilayah. Dengan demikian, Heywood ingin mengatakan bahwa perilaku pemilih dikonstruksi oleh identitas sosial mereka.

Apabila kerangka pikir mashab sosiologis di atas dijelaskan melalui gambar 2, maka tampak sebagai berikut.

**Gambar 2. Model Mashab Sosiologis**



Apabila gambar di atas dirumuskan dalam bentuk pokok tulisan ini, maka dapat dibunyikan sebagai berikut:

“perilaku masyarakat dalam pemilu dibentuk oleh faktor eksternal, yaitu keluarga dan lingkungan sosial. Kekuatan lingkungan keluarga diukur dari pengaruh afiliasi politik orang tua, atau suami, atau istri atau anggota keluarga sebagai calon. Sedangkan kekuatan lingkungan sosial diukur dari pengaruh agama, stratifikasi sosial, geopolitik, jenis kelamin, dan usia”.

## **2. Mazhab Psikologis**

Pendekatan ini merupakan fenomena yang muncul dari kalangan ilmuwan Amerika Serikat melalui *Survey Research Center* di Universitas Michigan. Munculnya pendekatan ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis yang dianggap kurang dapat menjelaskan secara metodologis kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam diri individu, terutama yang terkait dengan preferensi politiknya terhadap suatu partai. Karena itu pendekatan ini juga dikenal dengan Mashab Michigan yang saat ini oleh para sarjana dijadikan referensi dalam mengkaji perilaku pemilih.

Mashab psikologis mengandaikan hipotesis kerjanya pada adanya variabel

seperti identifikasi kepartaian, orientasi terhadap kandidat, dan orientasi terhadap isu sebagai dasar dalam menjelaskan perilaku memilih seseorang. Menurut Mashab ini pilihan seseorang terhadap partai politik tertentu melalui proses psikologis panjang, namun putusan akhir individu sangat bergantung kepada penilaiannya terhadap perkembangan politik kontemporer (faktor jangka pendek). Proses psikologis yang panjang yang berlangsung pada diri individu inilah yang melahirkan istilah identifikasi kepartaian.

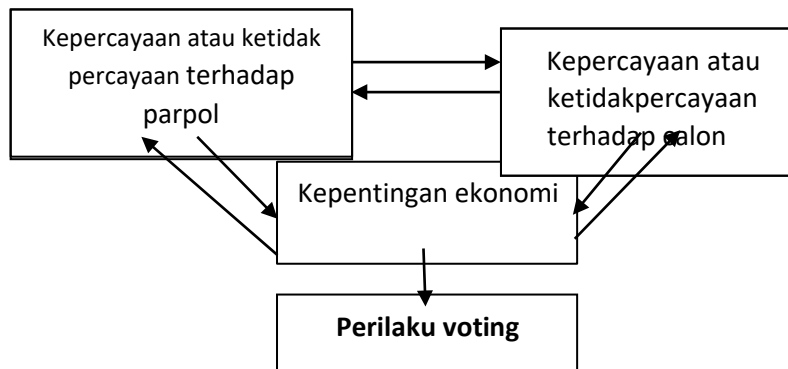
Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah identifikasi kepartaian terjadi secara spontan dalam diri individu? Mashab psikologi menjawab tidak. Identifikasi kepartaian tidak hadir dengan sendirinya dalam diri individu, namun berproses sejak perkembangan individu pada masa remaja yang cenderung mengikuti preferensi politik orang tua mereka. Jika orang tua mereka mengidentifikasi diri mereka pada satu partai tertentu, maka anak-anak mereka (cenderung) juga mengidentifikasi diri mereka dengan partai tersebut. Dari satu segi, identifikasi kepartaian ini hanya upaya individu mendekati dirinya kepada satu partai tertentu secara psikologis dalam waktu tertentu dan belum tentu memilih partai politik tersebut pada waktu yang lain pada saat pemilu.

Lebih jauh, pendekatan psikologis juga mengidentifikasi perilaku memilih individu dari proses sosialisasi yang mereka dapatkan dari lingkungan persekitarannya. Misalnya, sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik lingkungan keluarga maupun perkawanan mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang adalah refleksi dari kepribadiannya dan menjadi variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik individu tersebut. Karena itu pendekatan psikologis mengaitkan dengan tiga aspek utama yaitu; ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang, dan orientasi terhadap kandidat. Ketiga aspek ini digambarkan dalam gambar 3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.

Gambar di atas menerangkan bahwa perilaku pemilih (*voting*) dikonstruksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap partai, kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap calon, dan kepentingan ekonomi pemilih. Seseorang yang orang tuanya (ayah atau ibu) berasal dari partai A, cenderung akan memilih partai A dibanding dengan partai B. Namun demikian, pilihan seseorang dapat juga dikonstruksi oleh ketertarikannya terhadap isu yang diusung oleh partai. Konstruksi lain yang mempengaruhi pilihan seseorang adalah ketertarikannya terhadap kandidat. Bisa saja dalam suatu pemilu seseorang tidak tertarik pada suatu partai politik dan isu yang diusung partai politik bersangkutan, tetapi dia tertarik pada seorang kandidat atau faktor figuritas.



**Gambar.3. Model Pendekatan Mashab Psikologis**



### **Figuritas, Tokoh Panutan, dan Pemilih Otonom**

Data sekunder yang diperoleh dari KPU Lombok Timur memperlihatkan alasan masyarakat untuk memilih karena didorong oleh keinginan sendiri, figur populer, himbauan tokoh panutan, kesamaan partai politik, dan terakhir sevisi. Dalam pemilihan legislatif pemilih bersifat otonom paternalistik, karena partisipasi memilih didorong keinginan sendiri bukan atas dorongan lain. Namun demikian peran elit dalam memobilisasi juga tidak dapat dikesampingkan. Selisih di antara kedua faktor tersebut tidak begitu besar. Bila figur populer dan himbauan tokoh diasumsikan sebagai jenis partisipasi mobilisasi maka angkanya melampaui partisipasi otonom.

Dalam Pemilihan Presiden tahun 2014, dapat disimpulkan partisipasi disebabkan karena figuritas dari peserta pemilu. Hal ini tidak lepas dari massifnya kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di berbagai saluran komunikasi massa. Peserta pemilu begitu teringat dalam benak pemilih dengan beragam persepsi yang dihasilkan. Selain itu, faktor keinginan sendiri dan himbauan tokoh juga menjadi faktor lain yang cukup menentukan partisipasi memilih dalam pemilihan presiden yang lalu.

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan tiga faktor dominan dalam menentukan perilaku pemilih di Kabupaten Lombok Timur, yakni; figur populer, himbauan tokoh, dan keinginan sendiri. Dua faktor pertama dikonstruksi oleh lingkungan social, sebagaimana yang diyakini oleh mazhab sosiologis, sedangkan yang disebutkan terakhir merupakan gambaran dari sikap pemilih berdasarkan refleksi dari kepribadiannya sebagaimana diyakini oleh mazhab psikologis.

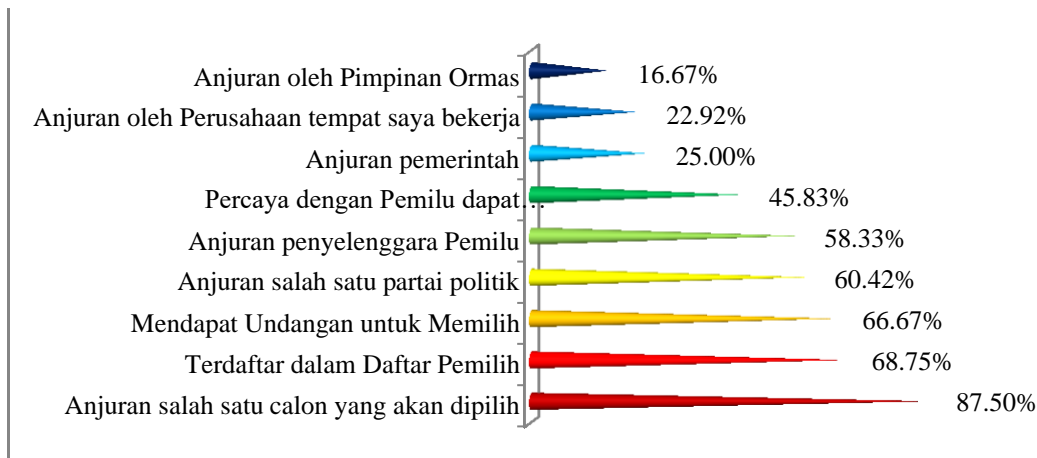
Dengan demikian terlihat ada jenis partisipasi yang terombang-ambing dari bentuk otonom dan mobilisasi. Hal ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang kuatnya figuritas dan pengaruh tokoh dalam menentukan perilaku memilih di Pulau Lombok.

### **Percaya Pada Calon Tapi Tidak Percaya Pada Partai**

Pemilih rasional merupakan tipologi pemilih yang mengetahui alasan mereka menggunakan hak pilih. Pemilih rasional memilih karena mengetahui visi, misi dan program kandidat, bukan karena faktor-faktor di luar pemilih. Temuan penulis di Kabupaten Sumbawa Barat, faktor paling dominan mempengaruhi perilaku pemilih

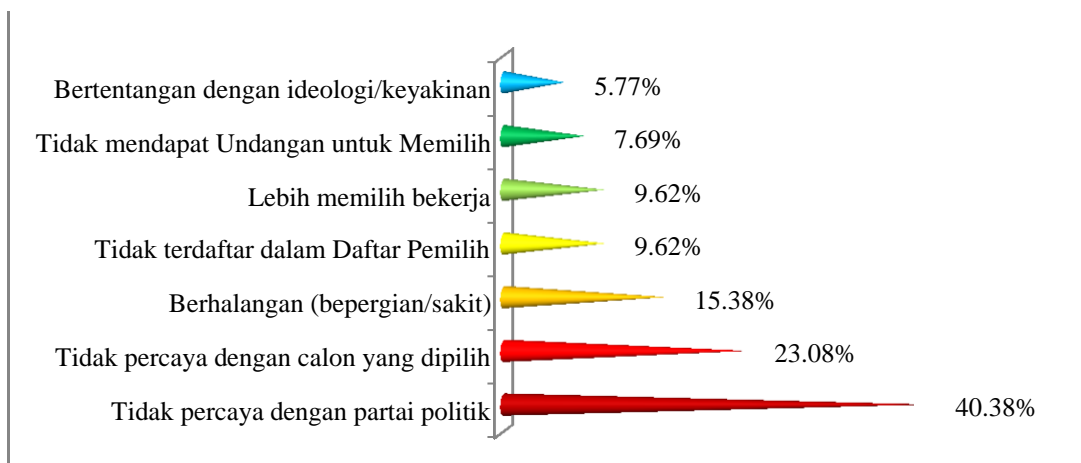
dalam menentukan pilihannya karena anjuran dari calon yang akan dipilih, sedangkan anjuran ormas justru menempati posisi sebagai faktor paling rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada grafik 1.

**Grafik 1 Alasan Pemilih Ikut Memberikan Suaranya**



Tingkat rasionalitas masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat juga ditunjukkan oleh kemampuan mereka menilai secara kritis perihal pemilu dan demokrasi. Terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014, penulis menemukan beberapa alasan mereka tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana grafik 2 di bawah ini.

**Grafik 2 Alasan Pemilih Tidak Ikut Memberikan Suaranya**



Dari Grafik 2 yang ditampilkan di atas, semakin jelas bahwa faktor ketidakpercayaan terhadap partai politik paling dominan mendorong pemilih untuk tidak

memberikan suaranya dalam pemilu. Menyusul alasan lainnya yang masih senada adalah ketidakpercayaan terhadap calon yang akan dipilih.

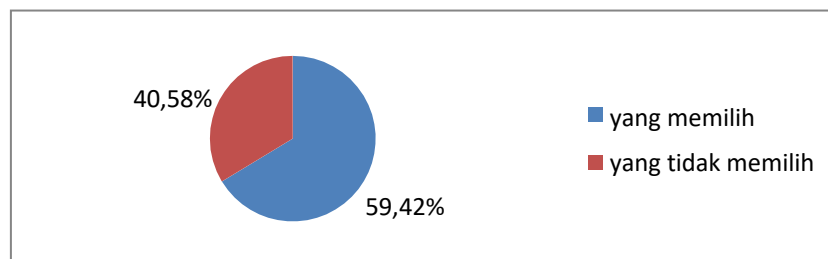
Fenomena ini menjadi menarik, karena faktor peserta pemilu terutama performance calon yang diusung oleh partai politik menjadi hal yang dapat mendongkrak angka partisipasi pemilih. Meskipun demikian, pada di sisi yang lain juga menjadi alasan pemilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Dengan begitu, menjadi lebih mudah untuk di baca bahwa seiring semakin tingginya intensitas pemilu di tanah air, pemilih sudah memperlihatkan perkembangannya ke arah pemilih rasional dan perlahan meninggalkan karekteristiknya sebagai pemilih tradisional.

### **Teknis Pemilu dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat**

Meskipun rasionalitas pemilih sudah muncul sebagaimana kasus di Kabupaten Sumbawa Barat, namun faktor teknis pemilu juga mempengaruhi atensi masyarakat terhadap suatu ornamen pemilu. Faktor teknis pemilu menjadi alasan cukup signifikan bagi masyarakat untuk tidak mau menggunakan hak pilih mereka ke tempat pemungutan suara (TPS). Data dari KPU Kabupaten Sumbawa memperlihatkan satu kasus pada TPS 001 Desa Jaya Makmur ketika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014.

TPS ini merupakan tempat partisipasi pemilih yang paling rendah dari semua TPS yang ada di kecamatan Labangka. Adapun jumlah pemilih terdaftar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 515 pemilih, dimana jumlah yang ikut memilih sebanyak 209 orang sedangkan yang tidak memilih sebanyak 306 pemilih. Bila dipersentasekan maka jumlah yang memilih sebanyak 40,58% dan jumlah yang tidak memilih sebanyak 59,42%. Dengan demikian angka tidak memilih lebih tinggi dibanding angka yang memilih.

**Grafik 3 Persentase yang memilih dan tidak memilih**



Berdasarkan hasil wawancara, dengan responden yang dijadikan sampel ketika penulis melakukan observasi di Kabupaten Sumbawa, ditemukan fenomena bahwa selama masa kampanye pemilu presiden yang berlangsung sejak tanggal 4 Juni hingga 5 Juli 2014, responden menyebutkan “tidak ada kampanye sama sekali di wilayah kecamatan, apalagi di Desa Jaya Makmur”. Sehingga masyarakat Desa Jaya Makmur tidak tersentuh secara langsung dengan kegiatan kampanye Pilpres. Media Kampanye yang bisa diakses masyarakat adalah melalui stiker-stiker kecil calon presiden dari

beberapa tim, yang berasal dari kader partai politik pendukung calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, masyarakat Desa Jaya Makmur sangat terbatas dalam memahami pasangan calon presiden yang maju dalam Pilpres. Efek berikutnya, responden mengatakan mereka tidak datang memilih karena tidak memiliki calon yang diunggulkan. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya di desa tersebut memang tidak ada pasangan calon presiden yang tidak memiliki tim pemenang. Akibatnya, komunikasi politik antara kandidat dengan masyarakat tidak terjadi secara langsung. Masyarakat hanya mengetahui informasi pemilu melalui media televisi. Kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu seperti KPU, PPK dan PPS juga memberikan kontribusi terhadap kurangnya informasi tentang calon presiden dan calon wakil presiden kepada masyarakat.

Semua hal di atas juga dibenarkan oleh beberapa responden kunci. Responden kunci adalah para responden yang ditunjuk langsung oleh penulis untuk menguji tingkat validitas dari jawaban masyarakat. Adapun responden kunci dari Desa Jaya Makmur adalah Sekretaris Desa. Dalam wawancara penelitian, Sekretaris Desa membenarkan pernyataan masyarakat di atas, sehingga penulis meyakini faktor teknis menjadi faktor strategis dalam konstruksi perilaku memilih.

Penulis juga menemukan beberapa alasan lain masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014, sebagai berikut: *pertama*, pemilihan presiden bertepatan dengan panen jagung. Masih dalam kecamatan dan desa yang sama, misalnya, dari 20 jumlah responden, 13 menjawab sibuk dengan urusan panen jagung mereka. Bila di persentasekan maka jumlah mereka adalah 65%. Berdasarkan hasil observasi dan diperkuat oleh data penduduk, memang benar bahwa mayoritas petani di kecamatan Labangka khususnya di desa Jaya Makmur adalah petani jagung dan pada bulan Juli para petani masih banyak yang sibuk dengan urusan panen jagung mereka. Disamping itu, jarak antara kampung mereka dengan lahan jagung cukup jauh mengakibatkan mereka tidak mau memilih dan cenderung apatis terhadap pemilu. Ada yang pulang kampung

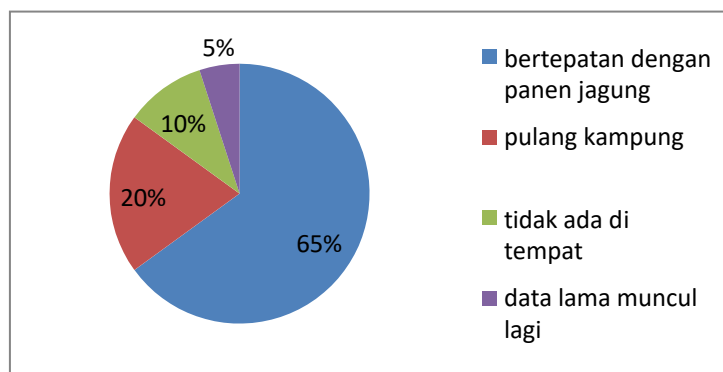
*Kedua*, pulang kampung saat pemungutan suara. Sebagian besar penduduk di kecamatan Labangka khususnya di desa Jaya Makmur berasal dari Lombok. Ketika waktu pemungutan suara berlangsung, sebagian dari petani ada yang pulang kampung sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa memilih. Pada bulan Juli, lebih dari separuh jumlah petani sudah selesai panen, terlebih mereka sudah menjual hasil panennya. Kebiasaan mereka setelah panen berakhir, mereka pulang ke Lombok untuk silaturahmi dengan keluarga. Dari 20 jumlah responden, 4 dari mereka menjawab dengan jawaban pulang kampung dan bila di persentasekan maka jumlah mereka adalah 20%.

*Ketiga*, tidak ada di tempat. Faktor lain yang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat Labangka adalah mereka tidak ada di tempat. Sebagian dari masyarakat ada yang kuliah di luar daerah seperti di Mataram, Malang, dan daerah lain. Disamping itu, ada juga diantara mereka yang pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKI/W. Jumlah mereka lebih sedikit dari total jumlah sampel yaitu 2 responden atau 10%

Keempat, DPT Tidak Akurat (data lama muncul lagi). Di dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT), masih terdapat data lama yang sudah dihapus oleh anggota PPS tetapi nama tersebut masih muncul lagi di DPT. Hal ini berdasarkan hasil yang telah ditelusuri oleh peneliti dan anggota PPS. Ketika peneliti dan anggota PPS menelusuri nama-nama yang terdapat dalam DPT, ternyata ada beberapa dari nama tersebut yang memang sudah dihapus oleh anggota PPS tetapi ketika daftar nama pemilih tetap dikeluarkan oleh KPU, nama tersebut masih ada lagi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan data tersebut dihapus oleh anggota PPS yang terdahulu misalnya karena alasan perkawinan, pindah domisili, dan lain-lain. Adapun jumlah atau persentase yang tidak ikut partisipasi politik karena data lama muncul lagi sebanyak 5%.

**Grafik 4. Alasan Masyarakat Tidak Memilih**



### **Kesimpulan**

Dengan menggunakan dua mazhab sekaligus, yakni mazhab sosiologis dan mazhab psikologis sebagai jendela analisis, dapat ditemukan tiga simpulan, sebagai berikut. Pertama, meskipun sebagian masyarakat memperlihatkan perilaku memilihnya bersifat otonom (atas keinginan sendiri), namun sebagian lagi memperlihatkan perilaku memilihnya dikonstruksi oleh figuritas, himbuan tokoh panutan (Tuan Guru, pimpinan Ormas, dan lain-lain), dan mobilisasi dari calon atau kerabat.

Kedua, dalam kasus pemilu legislatif terdapat perilaku yang menarik. Masyarakat sangat percaya pada calon, tetapi sangat tidak percaya pada partai politik. Fenomena ini terlihat dari perbandingan terhadap alasan mereka memilih dan alasan mereka tidak memilih. 87,50% masyarakat memilih karena anjuran salah satu calon yang akan di pilih. Ini artinya mereka sangat percaya pada calon. Tetapi 40,38 % masyarakat tidak memilih karena mereka tidak percaya pada partai politik.

Keempat, selain alasan-alasan tidak percaya pada partai politik, masyarakat memutuskan untuk tidak memilih pada pemilu 2014 dengan dua alasan, yakni karena teknis pemilu dan aktivitas ekonomi. Dari sisi teknis pemilu, misalnya 5 % dari mereka yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau ganda. Keduanya terjadi karena data pemilih lama yang dikeluarkan oleh KPU pada pemilu yang telah lama muncul kembali. Tetapi 65 % mengatakan karena hari pemungutan suara

bertepatan dengan panen jagung yang merupakan aktivitas ekonomi mereka. Sisanya karena alasan pulang kampung dan tidak ada di tempat.

## Daftar Pustaka

- Asrinaldi, 2012, *Politik Masyarakat Miskin Kota*, Yogyakarta, Gava Media.
- Budiardjo, Miriam, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Gafar, Afan, 1992, *Javanse Voters; a study of election under a study of election under a hegemonic party system*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Geertz, Clifford, 2014, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, Jakarta, Komunitas Bambu.
- Hewood, Andrew, 2014, *Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly.M, & Kolip Usman, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*, IRCiSOD.